

**PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI PROGRAM  
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)  
(Studi pada Program Kemitraan Perum Perumnas Regional VI  
Surabaya)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Disusun Oleh :

**AHMAD TOBARI**  
**0341010152**

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JATIM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
SURABAYA  
2010**

**PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI PROGRAM KEMITRAAN DAN  
BINA LINGKUNGAN (PKBL)**  
(Studi pada Program Kemitraan Di Perum Perumnas Regional VI Surabaya)

Disusun oleh:

**AHMAD TOBARI**  
NPM. 0341010152

Telah dipertahankan, dihadapkan, dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Progdi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 05 Maret 2010

Menyetujui,

**PEMBIMBING**

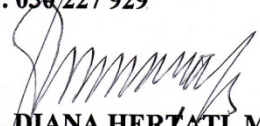
  
**Dra. DIANA HERTATI, M. Si**  
NIP. 030 201 935

**TIM PENGUJI**

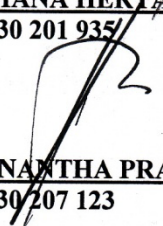
1.

  
**Dr. LUKMAN ARIF, M. Si**  
NIP. 030 227 929

2.

  
**Dra. DIANA HERTATI, M. Si**  
NIP. 030 201 935

3.

  
**Drs. ANANTHA PRATAMA, M. Si**  
NIP. 030 207 123

Mengetahui,

  
**DEKAN**  
**Dra. E. H. SUPARWATI, M. Si**  
NIP. 030 175 394

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

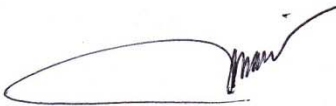
**PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI PROGRAM KEMITRAAN DAN  
BINA LINGKUNGAN (PKBL)**

**(Studi pada Program Kemitraan Di Perum Perumnas Regional VI Surabaya)**

Nama mahasiswa : AHMAD TOBARI  
NPM : 0341010152  
Progdi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Telah direvisi pada tanggal : 17 Maret 2010

**PENGUJI I**



**Dr. Lukman Arif, M. Si**  
NIP. 030 227 929

**PENGUJI II**



**Dra. Diana Hertati, M. Si**  
NIP. 030 201 935

**PENGUJI III**



**Drs. Anantha Pratama, M. Si**  
NIP. 030 207 123

**PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI  
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
(PKBL)**

(Studi pada Program Kemitraan PKBL Perum Perumnas Reg. VI)

Disusun oleh:

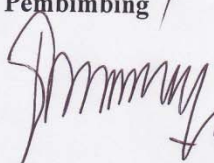
AHMAD TOBARI

0341 010 152

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

Menyetujui,

Pembimbing



DRA. DIANA HERTATI, M. Si

NIP 030 201 935

Mengetahui,

DEKAN



DRA. HJ. SUPARWATI, M. Si

NIP. 030 175 394

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) (Studi Tentang Dana Pinjaman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PERUM PERUMNAS Regional VI Surabaya”**. Tugas ini dibuat dalam memenuhi persyaratan kurikulum pada Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.

Dalam tersusunnya tugas ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dra. Diana Hertati, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Disamping itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dra. Hj. Suparwati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. Lukman Arif, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Seluruh Staf Perum Perumnas Regional VI Surabaya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Kedua Orang tuaku, kakak serta adik-adikku tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil selama proses penyusunan proposal skripsi ini.

6. Teman-teman dan semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan laporan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih ada kekurangan-kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu penulis senantiasa bersedia dan terbuka dalam menerima saran, kritik dari semua pihak yang dapat menambah kesempurnaan skripsi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih serta besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 25 Februari 2010

Penulis

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Kerangka Berpikir</i> .....	44
Gambar 2. <i>Analisis data interaktif</i> .....	52
Gambar 3. <i>Struktur Organisasi</i> <i>Perum Perumnas Regional VI Surabaya</i> .....	58
Gambar 4 <i>Alur Pinjaman Modal</i> <i>Perum Perumnas Regional VI</i> .....	73

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 Penyaluran Pinjaman Modal Usaha Program Kemitraan Perum Perumnas Reg. VI Surabaya Tahun 2008-2009 .....	10
TABEL 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	65
TABEL 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal .....	66
TABEL 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	67
TABEL 5 Daftar Mitra Binaan PKBL Perum Perumnas Regional VI di Surabaya .....	69
TABEL 6 Daftar Pinjaman Yang Diberikan Kepada Mitra Binaan PKBL Perum Perumnas Regional VI di Surabaya .....	71
TABEL 7 Daftar Mitra Binaan Yang Mempunyai Tunggakan Angsuran Pinjaman Modal PKBL Perum Perumnas Reg. VI .....	84
TABEL 8 Daftar Mitra Binaan yang mampu menunjang kegiatan Usahanya dengan fasilitas internet melalui Diklat Pengenalan Internet PKBL Perum Perumnas Reg. VI. Surabaya .....	90
TABEL 9 Daftar Mitra Binaan yang hanya menambah wawasan tentang penggunaan komputer dalam Diklat Pengenalan Internet PKBL Perum Perumnas Reg. VI Surabaya .....	91



## **ABTRAKSI**

### **AHMAD TOBARI, 2010, Peberdayaan Usaha Kecil Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Studi pada Program Kemitraan Perum Perumnas Reg. VI.**

Dosen Pembimbing : Dra. Diana Hertati, M. Si

121 Hal +

Penelitian ini didasarkan pada keberhasilan PKBL Perum Perumnas Reg. VI dalam memberdayakan 21 UKM dari 33 UKM yang menjadi Mitra Binaan Perum Perumnas Reg. VI di Surabaya pada tahun 2008. Indikator keberhasilan Program Kemitraan Perum Perumnas Reg. VI didasarkan pada pembayaran angsuran dari pinjaman modal yang diberikan kepada Mitra Binaan. Pembayaran angsuran pinjaman modal terbagi atas 3 kategori yaitu kredit lancar, kurang lancar dan macet. Dari 33 UKM yang menjadi Mitra Binaan Perum Perumnas Reg. VI 21 diantaranya termasuk dalam kredit lancar, dari data tersebut dapat diketahui bahwa 21 Mitra Binaan berhasil meningkatkan kegiatan usahanya menjadi tangguh dan mandiri. Pemberdayaan yang dilakukan oleh PKBL Perum Perumnas Reg. VI dilaksanakan dengan memberikan pinjaman modal usaha dan pembinaan berupa diklat pengenalan internet kepada UKM yang menjadi Mitra Binaan PKBL Perum Perumnas Reg. VI.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu meliputi Staff PKBL dan Mitra Binaan PKBL Perum Perumnas Reg. VI. Sedangkan data sekunder berasal dari hasil dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria: derajat kepercayaan, keteralihan, standar ketergantungan, kepastian. Fokus penelitiannya adalah Pemberdayaan Usaha Kecil melalui pemberian pinjaman modal usaha dan pembinaan melalui diklat pengenalan internet oleh PKBL Perum Perumnas Reg. VI. Dari data yang dianalisis maka dapat disimpulkan pemberian pinjaman modal usaha telah dilaksanakan sesuai prosedur yang baik dan dapat membantu Mitra Binaan untuk meningkatkan kegiatan usahanya sedangkan dalam pembinaan berupa diklat pengenalan internet tidak dapat menjadi fasilitas penunjang bagi semua Mitra Binaan, Mitra binaan yang bergerak di bidang pertokoan dan warung makanan tidak dapat mempergunakan fasilitas internet untuk meningkatkan usahanya sehingga pemberdayaan yang dilakukan PKBL Perum Perumnas Reg. VI belum sepenuhnya berhasil.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang**

Usaha kecil dan menengah atau yang disebut UKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi. Gerak sektor usaha kecil dan menengah amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, dan mereka juga cukup memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. Karena itu UKM merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi yang kompetitif.

Krisis ekonomi yang menerpa Indonesia sejak tahun 1997 hingga sekarang telah menumbuhkan kesadaran berpikir dengan paradigma baru dalam pengelolaan ekonomi nasional. Paradigma lama pembangunan ekonomi yang bertumpu serta mengandalkan peranan konglomerat atau swasta nasional ternyata membuat rapuh fundamental ekonomi nasional. Pengelolaan ekonomi yang kurang transparan dan kurang memberikan partisipasi pelaku ekonomi lainnya, menimbulkan ketimpangan dalam penguasaan aset nasional. Akibatnya penguasaan perekonomian jatuh ke tangan kelompok bisnis yang berskala besar yang tidak mengakar pada kepentingan rakyat banyak.

Pelaku ekonomi dalam konteks Indonesia terdiri dari tiga pilar utama, yakni BUMN, Koperasi dan Swasta (UKM dan Nasional). Dan kenyataannya peranan BUMN dan Koperasi, selama ini terlihat kurang begitu diperhatikan dalam struktur ekonomi nasional, sehingga kondisi ini sering kali menimbulkan beban ekonomi yang pincang. Hal ini terbukti ketika beberapa negara Asia diterpa krisis akibat fluktuasi nilai tukar uang, Indonesia-lah yang paling parah mengalami keterpurukan. Kondisi ini lebih disebabkan beban hutang yang besar yang dilakukan oleh swasta telah memberikan kontribusi yang besar terhadap ambruknya perekonomian nasional.

Langkah yang segera ditempuh dalam memperbaiki kembali kondisi ekonomi nasional adalah mengembalikan pengelolaan perekonomian kepada ketiga pilar tersebut secara berimbang. Dalam rangka memberikan kesempatan yang berimbang kepada ketiga pelaku ekonomi dalam pengelolaan perekonomian nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berbentuk program kemitraan yaitu pembinaan dan pemberian kredit murah untuk modal kerja UKM.

Dengan kondisi ini diharapkan akan tumbuh UKM yang sehat bukan UKM yang direkayasa oleh pemerintah atau siapapun. Oleh karenanya keberhasilan UKM lebih ditentukan oleh faktor kualitas dan manfaat serta berorientasi kepada pasar.

Pengertian kemitraan menurut undang-undang nomor 9 tahun 1995 pada bab I dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha

menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, ini merupakan suatu landasan pengembangan usaha.

Kerjasama ini tidaklah terwujud dengan sendirinya saja, akan tetapi harus dibangun dengan sadar dan terencana, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat lokal yang lebih rendah. Gerakan Kemitraan Usaha Nasional adalah wahana utama untuk meningkatkan kemampuan wirausaha nasional, karena ujung tombak dalam menghadapi era ekonomi terbuka dan perdagangan bebas adalah wirausaha nasional. kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. (<http://puslit.petra.ac.id/journals>)

Selama ini istilah kemitraan ini telah dikenal dengan sejumlah nama, diantaranya strategi kerjasama dengan pelanggan (*strategic customer alliance*), strategi kerjasama dengan pemasok (*strategic supplier alliance*) dan pemanfaatan sumber daya kemitraan (*partnership sourcing*). Banyak program pemerintah yang dibuat demi majunya usaha kecil. Hal ini bertujuan untuk mendorong dan menumbuhkan pengusaha kecil tangguh dan modern, pengusaha kecil sebagai kekuatan ekonomi rakyat dan berakar pada masyarakat, pengusaha kecil yang mampu memperkokoh struktur perekonomian nasional yang lebih efisien. (<http://puslit.petra.ac.id/journals>)

Kemitraan pada dasarnya menggabungkan aktivitas beberapa badan usaha bisnis, oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu organisasi yang memadai. Dengan pendekatan konsep sistem, diketahui bahwa organisasi pada dasarnya terdiri dari sejumlah unit atau sub unit yang saling berinteraksi dan interdependensi. Performansi dan satu unit dapat menyebabkan kerugian pada unit-unit lainnya. Misalnya peningkatan penjualan tanpa diimbangi kapasitas produksi yang lebih memadai, justru akan memperburuk efisiensi

Usaha Besar (BUMN dan Swasta Nasional) mempunyai kewajiban yang semestinya harus diwujudkan yakni membina usaha kecil untuk bersama-sama meningkatkan perekonomian nasional. Namun, agar upaya tersebut dapat dicapai dengan optimal, perlu dilakukan pembenahan berupa pembinaan terhadap beberapa aspek yang selama ini dinilai menjadi permasalahan yang dihadapi UKM meliputi: aspek permodalan, pemasaran, bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi, infrastruktur, dan perlunya kemitraan.

BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional yang masuk kategori usaha skala besar yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, keberpihakannya kepada UKM dan Koperasi cukup besar dibandingkan pihak Swasta. Hal ini dibuktikan oleh BUMN dengan adanya Surat Keputusan nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha kecil dan Bina Lingkungan (PKBL), di mana BUMN akan mengalokasikan dana sebesar 2 % dari keuntungan bersih setelah pajak untuk program Kemitraan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada dasarnya merupakan wujud tanggung jawab sosial BUMN kepada masyarakat. Secara umum, PKBL diwujudkan dengan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Aktivitas PKBL merupakan wujud nyata dari Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dimana Masyarakat Miskin merupakan sasaran utamanya. ([http://www.depkop.go.id/depkopgoid2008/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=625&Itemid=.](http://www.depkop.go.id/depkopgoid2008/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=625&Itemid=))

Program Kemitraan berupaya meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil. Komitmen pemerintah ini akan menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha kecil untuk dapat berkembang dengan pemanfaatan peluang, kemudahan dan keberpihakan pemerintah. Pada gilirannya mereka diharapkan dapat memberdayakan dirinya sendiri dan mampu berperan aktif dalam rangka memenangkan persaingan pasar (<http://www.pp3.co.id/detnew.php?id=208>).

Program kemitraan berupaya agar masyarakat bisa diberdayakan dan bisa mengakses sumber-sumber ekonomi terutama adalah permodalan. Oleh karena itu program kemitraan berupaya bagaimana rakyat miskin dan pengusaha-pengusaha kecil mikro ini bisa mengakses kepada sumber-sumber pembiayaan.

Peningkatan usaha kecil yang diarahkan pada upaya untuk mewujudkan usaha kecil menjadi :

1. Gerakan ekonomi rakyat yang sehat, efisien, tangguh, kuat dan mandiri.
2. Mampu menjadi soko guru perekonomian nasional yang merupakan bentuk nyata peningkatan peran sertanya dalam pembangunan.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja.

Untuk mencapai hasil yang optimal semestinya ketiga pelaku ekonomi dapat saling bersinergi satu sama lain saling terjadi "ketergantungan" yang dapat dalam kegiatan yang bersifat komplementer.

Dalam hal ini, peran pemerintah terhadap pemberdayaan usaha kecil sangat dibutuhkan karena usaha kecil perlu diberi kemudahan baik permodalan, perizinan dan pemasaran serta ditingkatkannya usaha dan saling menguntungkan melalui pola kemitraan dalam meningkatkan peran dan kedudukan usaha kecil dalam pembangunan.

Perum Perumnas Reg VI turut membantu pemerintah dalam kemudahan menyediakan pinjaman modal kerja melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Peningkatan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri oleh PKBL PERUM PERUMNAS Regional VI Surabaya diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman untuk membiayai modal kerja atau pembelian aktiva tetap usaha kecil yang berada di Surabaya.

PKBL Perum Perumnas Regional VI memberikan pinjaman modal usaha kepada mitra binaan di Surabaya, sedangkan di wilayah kerja Perum

Perumnas Regional VI yang lain sudah terdapat kantor cabang yang melaksanakan Program Kemitraan. (*Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Perumnas Reg. VI*)

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan memberdayakan usaha kecil melalui :

1. Pinjaman modal bagi usaha kecil yang menjadi mitra binaan di wilayah kerja BUMN pembina untuk meningkatkan produksi dan penjualan.
2. Pembinaan yang bersifat hibah untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas mitra binaan serta untuk pengkajian/ penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan.

(Peraturan Menteri BUMN No PER 05/MBU/2007 pasal 11)

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan memberikan pinjaman modal usaha kepada UKM yang telah terdaftar menjadi binaan PKBL Perum Perumnas Regional VI atau yang disebut mitra binaan di wilayah kerjanya.

Dalam proses pemberian pinjaman modal, pengusaha kecil yang ingin menjadi mitra binaan PKBL Perum Perumnas Regional VI diharuskan membuat proposal pengajuan pinjaman yang memuat kebutuhan dana pengembangan usaha, surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang dan data pribadi pemilik usaha. (*Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Perumnas Reg. VI 2008*)



Salah satu kendala pengusaha kecil dalam mengakses pinjaman modal adalah adanya agunan/jaminan sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman, menurut Parikesit Suprpto Phd (Staff Ahli Menteri Bidang Usaha Kecil) dalam acara Gemari Show, Kamis 25 Oktober 2007 mengatakan:

*“Dalam aturan, kita tidak kita atur masalah jaminan, tapi beberapa BUMN melakukan hanya untuk ikatan bathin, ikatan moral antara peminjam dan BUMN dan bukan menjadi persyaratan mutlak”.*

Sehingga agunan/jaminan atas pinjaman modal yang disalurkan bukan merupakan prasyarat mutlak bagi pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pinjaman modal usaha, tergantung dari BUMN akan meminta agunan/jaminan kepada pengusaha kecil atau tidak.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan pinjaman modal oleh UKM maka pihak PKBL Perum Perumnas Regional VI melaksanakan evaluasi dan seleksi kelayakan usaha kepada UKM setelah mengajukan proposal pengajuan pinjaman modal. Evaluasi dan seleksi kelayakan usaha dilakukan dengan cara survey lokasi dan identifikasi keterangan-keterangan yang menyangkut kelayakan usaha calon mitra binaan. (Peraturan Menteri BUMN No PER 05/MBU/2007 pasal 5)

Setelah pengusaha kecil menjadi mitra binaan PKBL Perum Perumnas Regional VI maka ia harus melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada PKBL Perum Perumnas Regional VI sebagai bentuk pengawasan BUMN pembina kepada mitra binaannya. Sehingga mitra binaan dapat dipantau perkembangannya. (Peraturan Menteri BUMN No PER 05/MBU/2007 pasal 4).

Sebagai proses pemberdayaan PKBL Perum Perumnas Regional VI melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan produktifitas mitra binaan dalam bentuk hibah untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan.

Dalam pelaksanaannya hibah tidak dipakai untuk membiayai seluruh bentuk pembinaan, hal ini dikarenakan beban pembinaan besarnya hanya 20 % dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. Jika beban pembinaan hanya mampu untuk membiayai pendidikan dan latihan maka bentuk pembinaan yang lain tidak dilaksanakan. (Peraturan Menteri BUMN No PER 05/MBU/2007 pasal 11)

Pada tahun 2008-2009 alokasi dana Program Kemitraan Perum Perumnas Regional VI sebesar Rp. 225.000.000 yang terbagi menjadi 2 sub program yaitu pemberian pinjaman dana kepada usaha kecil sebesar Rp. 200.000.000 dan untuk hibah dialokasikan sebesar Rp. 25.000.000 untuk pembiayaan pendidikan dan pelatihan. (*Rencana Kerja dan Anggaran PKBL Perum Perumnas Reg. VI 2008*).

Dengan adanya peminjaman modal bagi usaha kecil dan hibah untuk membiayai pendidikan dan pelatihan UKM Perum Perumnas Regional VI pada tahun 2008 berhasil memberdayakan UKM di Surabaya, selain mempunyai mitra binaan yang terbanyak Perum Perumnas Reg.VI juga berhasil memberdayakan 21 UKM dari 33 UKM di Surabaya. Perum Perumnas memiliki 21 mitra binaan berkualitas pinjaman lancar dan 12 mitra binaan lainnya kurang lancar, diragukan dan macet.

**Tabel 1**  
**Pemberian Pinjaman Modal Usaha Program Kemitraan Perum**  
**Perumnas Reg. VI Surabaya Tahun 2008-2009**

<b>Propinsi/Kota</b>	<b>Pinjaman Lancar</b>	<b>Pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet</b>
<b>1. Jawa Timur</b>		
a. Surabaya	21	12
b. Pasuruan	1	2
c. Banyuwangi	0	1
d. Jember	1	3
e. Madura	2	4
f. Mojokerto	2	1
g. Sidoarjo	5	11
h. Malang	2	2
i. Gresik	1	2
j. Kediri	1	0
<b>2. Bali</b>	3	3
<b>3. NTB</b>	1	1
<b>4. NTT</b>	2	2
<b>Jumlah</b>	41	44

*(Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Perumnas Reg. VI 2008 yang telah diolah).*

Setelah mitra binaan yang dikategorikan pinjaman lancar melunasi pinjamannya maka mitra binaan tersebut akan dilepas dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Perumnas Reg. VI.

Keberhasilan pemberdayaan UKM oleh PKBL Perum Perumnas Reg. VI Surabaya tidak lepas dari pelaksanaan pemberian pinjaman modal bagi UKM, dalam proses ini terdapat survey kelayakan yang dilakukan PKBL Perum Perumnas Reg. VI Surabaya. Dengan survey kelayakan UKM maka pihak PKBL Perum Perumnas Reg. VI Surabaya dapat mengetahui dan memilah UKM yang berpotensi untuk ditingkatkan kemampuannya dan keseriusan UKM tersebut untuk menjadi mitra binaan PKBL Perum Perumnas Reg. VI Surabaya.

Setelah UKM menjadi mitra binaan PKBL Perum Perumnas Reg. VI Surabaya dan diberi pinjaman modal maka UKM-UKM tersebut akan diberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan baik dalam meningkatkan produksi maupun dalam pemasaran produknya.

Berkaitan dengan hal tersebut, upaya pemberdayaan UKM dalam rangka mengembangkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri akan semakin menarik untuk dideskripsikan, sehingga dapat menjadi masukan yang berarti bagi penyempurnaan pelaksanaan Program Kemitraan antara BUMN dengan Usaha Kecil (PKBL) di wilayah lain.

Sehingga penelitian ini mengambil judul *“Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) (Studi pada Program Kemitraan PERUM PERUMNAS Regional VI Surabaya).”*

## **1.2 Perumusan masalah.**

Dari uraian diatas maka tujuan penelitian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Perumnas Regional VI adalah wujud pemberdayaan yang dilakukan BUMN dalam hal ini Perum Perumnas Regional VI terhadap usaha kecil melalui Program Kemitraan antara usaha kecil menengah dengan Perum Perumnas Reg. VI Surabaya.

Sehingga perumusan masalah dari penelitian ini dapat ditetapkan sebagai berikut : Bagaimana Pemberdayaan usaha kecil melalui Program Kemitraan antara Usaha Kecil dan Mengengah dengan Perum Perumnas Reg. VI Surabaya?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Pemberdayaan usaha kecil melalui Program Kemitraan antara Usaha Kecil dan Mengengah dengan Perum Perumnas Reg. VI Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Untuk meningkatkan pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah pada umumnya dan mengetahui Pembinaan Usaha Kecil

melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Perum Perumnas Reg. VI. pada khususnya.

2. Bagi Perum Perumnas Regional VI Surabaya.

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berguna bagi Perum Perumnas Regional VI didalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya Jawa Timur

Dapat menambah referensi di perpustakaan UPN “Veteran” Jatim.